

**PENGARUH PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
(UMKM) DAN LIKUIDITAS TERHADAP RESIKO PEMBIAYAAN  
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2017**

**(Skripsi)**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Intan Lampung**

**Oleh :**

**M. REZA ALGHIFFARI  
NPM : 1551020215**

**Jurusan : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H/2020 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
(UMKM) DAN LIKUIDITAS TERHADAP RESIKO PEMBIAYAAN  
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2017**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Intan Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Karena dapat mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan inovasi. Sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya dan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun yang menjadi permasalahan bagi pelaku usaha mikro adalah modal. Dalam penelitian ini Bank Syariah yang keberadaannya di harapkan dapat membantu memberikan modal tanpa adanya masalah dalam resiko pembiayaan dalam Bank Syariah itu sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap resiko pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2017? (2) Apakah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap resiko pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2017? (3) Bagaimana pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh terhadap resiko pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2017 dalam perspektif ekonomi Islam ? dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap resiko pembiayaan Perbankan Syariah, apakah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap resiko pembiayaan Perbankan Syariah dan bagaimana pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh terhadap resiko pembiayaan Perbankan Syariah dalam perspektif ekonomi islam.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Bank umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2017. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu dokumentasi, dokumen yang digunakan berupa laporan tahunan data yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa besaran pembiayaan memiliki pengaruh terhadap risiko pembiayaan atau *Non Performing Financing* (NPF) dimana besaran signifikansi ialah  $0,002 < 0,05$ . Sedangkan untuk variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,776 > 0,05$  yang artinya tidak memiliki pengaruh terhadap risiko pembiayaan atau *Non Performing Financing* (NPF) hal ini disebabkan oleh dalam pemberian pembiayaan UMKM terdapat agunan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nasabah UMKM yang merupakan program oleh pemerintah, selain itu program KUR ini telah dijamin oleh BUMN penjamin pembiayaan yaitu Askrindo dan Jamkirnda sehingga tidak akan terjadi resiko pembiayaan.

**Kata Kunci:** Likuiditas, Pembiayaan, Risiko Pembiayaan, UMKM.



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Reza Alghiffari  
NPM : 1551020215  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENGARUH PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN LIKUIDITAS TERHADAP RESIKO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2017 (Dalam perspektif Ekonomi Islam)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 17 Maret 2020  
Penyusun



  
**M. Reza Alghiffari**  
**NPM. 1551020215**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama : M. Reza Alghiffari**

**NPM : 1551020215**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan UMKM dan Liquiditas Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017 (Dalam Perspektif Islam)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag**  
**NIP. 195808241989031003**

**Agus Kurniawan, M.S.Ak**  
**NIP. -**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**  
**NIP. 198208082011012009**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : *Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN UMKM DAN LIQUIDITAS TERHADAP PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2017 (DALAM PERSPEKTIF ISLAM)”** disusun

oleh: **M. Reza Alghiffari NPM: 1551020215**, Program Studi: **Perbankan**

**Syari'ah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam pada : Hari/Tanggal: **Jum'at, 26 Juni 2020. Pukul 08.00-10.00 WIB.**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**

**Sekretaris : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I**

**Penguji I : Nurlaili, M.A.**

**Penguji II : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. H. Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP. 19800801 2003121001**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala Puji bagi Allah SWT atas rencananya yang begitu indah untu penulis. Penulis yakin semua akan tercapai jika berusaha dan selalu percaya pada-Nya. Shalawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Syafaat Beliau selalu menyertai Penulis Dunia dan Akhirat amiin. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua ku Bapak Rubiyatno S,Ag dan (Alm) Nurhayati S,Ag penulis menghaturkan terima kasih banyak atas seluruh kasih sayang, perhatian, do'a dan dukungannya kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Kedua Adikku M. Rahadian Abdillah dan Diah Salsa Ramadhani yang selalu memberikan dukungan sampai dan memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini
3. Seseorang yang selalu menemani dan memberikan semangat serta dukungan tanpa henti kepada peneliti dari awal penyusunan hingga terselesaikan tugas akhir ini, Nelly Ariyanti Nazier S.Psi
4. Teman-teman GTB Yovi Ridho Prabowo SE, Amar Cahyadi SE, Fandi Achmad SE, Rizky Putry H.SE, Reka Silvia M.SE, Aulia Hawadini SE, yang selalu menemani dan memberikan bantuan serta semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini

5. Teman teman dekat Anang Hidayatul, Arga indra Jaya, M. Topan Sakur,  
Ricky Irawan
6. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2015 Khususnya PS D
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung tempat  
menimba ilmu agar kedepannya mampu berfikir maju



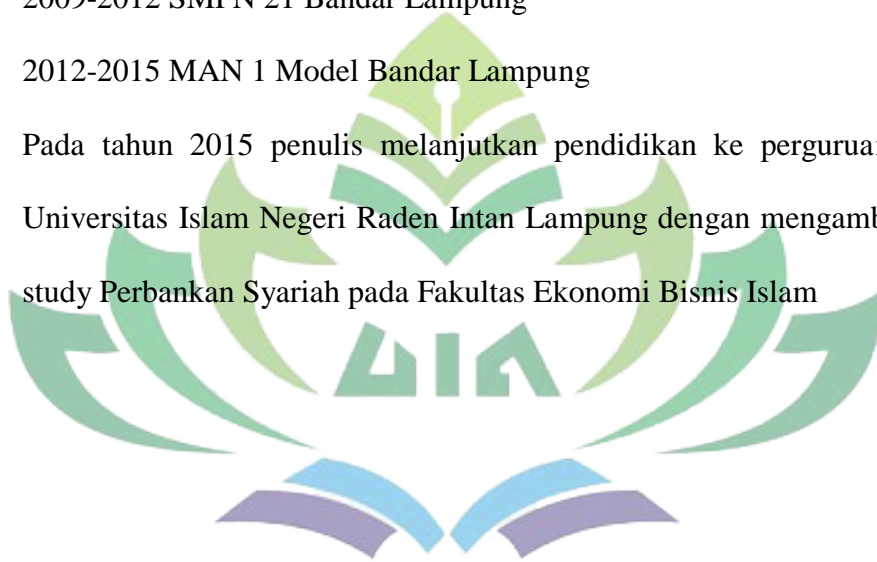


## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap M. Reza Alghiffari, di lahirkan di Lampung Selatan 31 Maret 1997, anak ke 1 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Rubiyatno S,Ag dan (Alm)b Ibu Nurhayati S,Ag.

Riwayat pendidikan :

1. 2003-2009 SDN 02 Harapan Jaya
2. 2009-2012 SMPN 21 Bandar Lampung
3. 2012-2015 MAN 1 Model Bandar Lampung
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil program study Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul -Pengaruh Risiko, Besaran Premi dan Klaim Pada Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Minat Calon Nasabah Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Bandar Lampung Menurut Perspektif Islam. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Penulis ungkapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Dr. Erike Aggraeni, M.E.Sy, selaku ketua jurusan prodi Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr.Moh Bahrudin, M.A. selaku dosen UIN Raden Intan Lampung sekaligus sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Agus Kurniawan, S.E.,M.Ak selaku, dosen UIN Raden Intan Lampung



sekaligus pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada penulis.
6. Pemimpin dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan data, referensi dan lain-lain.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan penulis dalam menulis skripsi. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini akan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung 02 Maret 2020

Penulis

M. Reza Alghiffari

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Fokus Masalah.....	12
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Manfaat Penelitian.....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Umum Pembiayaan Pengertian Pembiayaan .....	12
1. Jenis-jenis Pembiayaan.....	14
2. Unsur-unsur Pembiayaan.....	15
3. Tujuan Pembiayaan .....	17
4. Fungsi Pembiayaan .....	20
5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan.....	23
6. Pembiayaan Konsumtif .....	25
B. Usaha Kecil Mikro dan Menengah .....	28
1. Pengertian Usaha Mikro .....	28
2. Karakteristik Usaha Mikro .....	31
3. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro .....	33
4. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	36
C. Likuiditas .....	37
D. Resiko Pembiayaan .....	38
E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Islam .....	44
F. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Islam.....	45
G. Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Islam.....	47
H. Tinjauan Pustaka .....	49



I. Kerangka Berfikir .....	53
J. Hipotesis .....	53
1. UMKM Terhadap Resiko Pembiayaan .....	54
2. Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan .....	55
3. UMKM dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan .....	56

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian .....	59
1. Desain Penelitian .....	60
2. Sumber Data .....	60
3. Populasi dan Sampel .....	61
4. Teknik Pengumpulan Data.....	62
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	62
C. Teknik Analisis Data .....	63

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	71
1. Bank Umum Syariah .....	71
B. Analisis Data .....	89
1. Analisis Data Deskriptif .....	89
C. Uji Asumsi Klasik .....	92
1. Uji Normalitas .....	92
2. Uji Multikolinieritas .....	95
3. Uji Heteroskedastisitas .....	95
4. Uji Autokorelasi .....	97
D. Analisis Regresi Linier Berganda .....	98
E. Uji Determinasi .....	99
F. Pengujian Hipotesis .....	101
1. Uji Hipotesis Secara Parsial .....	101
2. Uji Hipotesis Secara Simultan .....	103
G. Pembahasan .....	104

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	107

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Menghindari terjadinya kesalahpahaman pada judul proposal ini “Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Priode 2014-2017” maka kata-kata pada judul tersebut akan diuraikan secara tegas sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup>
2. Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.<sup>2</sup>
3. Likuiditas bank diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari ala-alat likuid yang mudah ditunaikan guna menenuhi semua kewajiban jangka pendeknya.<sup>3</sup>
4. Resiko pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan ujah, atau bagi hasil sebagaimana telah di

---

<sup>1</sup> Surakhmad, Winarno, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik. Metodologi Pengajaran* . (Bandung: Tarsitio 1982), h. 65

<sup>2</sup> Achmadian Davin Wibisono, “Pengaruh Pembiayaan (UMKM) dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan”. (Jurnal kuitansi Universitas Surabaya) h.114

<sup>3</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT.Dwi Chandra Wacana 2010), h .68



sepakati dalam akad pembiayaan antara Bank Syariah dan nasabah penerima fasilitas.<sup>4</sup>

5. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.<sup>5</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa pembiayaan UMKM yng dilakukan oleh Bank Syariah dan likuiditasnya berhubungan dengan resiko pembiayaan perbankan syariah, semakin besar pinjaman Bank terhadap UMKM maka semakin tinggi resiko pembiayaan oleh karena itu Bank haus mempunyai likuiditas yang baik dalam menghadapi masalah resiko pembiayaan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Peneliti memutuskan mengambil judul ini karena bebrapa alasan sebagai berikut:

### **a. Alasan Objektif**

Peranan UMKM pada pertumbuhan ekonomi sangat besar dan menjadi primadona disemua kalangan masyarakat Indonesia, dan semakin meningkat pembiayaan umkm sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. modal yang dimiliki oleh BPRS dari tahun ketahun semakin meningkat, dan ada beberapa rasio yang mempengaruhi pembiayaan UMKM yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK),

---

<sup>4</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 25.

<sup>5</sup> Antonio, M. Safi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.3

Dan *Non Performing Financing* ( NPF). Penulis tertarik meneliti karena aspek-aspek tersebut sebagai faktor dalam resiko pembiayaan.

b. Alasan Subjektif

Pokok bahasan dalam penelitian tersebut sesuai dengan ilmu yang di pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Literatur dan sumber-sumber yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini cukup memadai dan tersedia di perpustakaan, jurnal dan website resmi Bank yang bersangkutan mengenai laporan keuangan yang sudah di audit dan di publikasikan dan di akses sehingga skripsi ini bisa di selesaikan.

**C. Latar Belakang**

Bank Syariah merupakan bank yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh bank konvensional. Hal ini dikarenakan perbankan tersebut menggunakan sistem bunga.<sup>6</sup> Dari Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah suatu bank yang melayani masyarakat dan mempunyai keyakinan bahwa kegiatan perbankan menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatannya terutama dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan kegiatan nyata/riil sehingga hasil yang didapatkan bukan hasil spekulasi seperti yang terdapat pada bank

---

<sup>6</sup> Antonio, M. Safi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.3

konvensional.<sup>7</sup> Selama ini bank syariah sangat besar dukungannya pada pelaku UMKM dibandingkan bank konvensional, dengan cara memberikan pembiayaan ke sektor UMKM.

Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria sebagaimana diatur dalam UU No. 02 Tahun 2019 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.<sup>8</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan utama pendirian bank syariah di Indonesia yaitu mendorong ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Terbukti perkembangan pembiayaan UMKM selalu meningkat setiap tahunnya dan memiliki porsi lebih tinggi daripada non UMKM.

Berikut tabel Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan UMKM

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan (dalam Milyar Rupiah)
1	2014	59.805
2	2015	50.291
3	2016	54.530
4	2017	58.979

Sumber data : [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)

<sup>7</sup> *Ibid*, h.115-116

<sup>8</sup> Achmadian Davin Wibisono, "Pengaruh Pembiayaan (UMKM) dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan" (Jurnal kuitansi Universitas Surabaya), h.114



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan UMKM naik setiap tahunnya kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan dari 59.805 menjadi 50.291. penurunan yang dialami pada tahun 2015 sangat signifikan. Tingkat pembiayaan UMKM dipengaruhi oleh tingkat likuiditas bank.

Manajemen likuiditas bank diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas bagi perusahaan adalah hal yang sangat penting, tidak terkecuali bagi perusahaan perbankan yang bergerak di bidang jasa. Likuiditas ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Ketidakmampuan bank menjaga likuiditas di atas batas minimum akan menyulitkan bank itu sendiri, karena dana-dana tunai yang seharusnya dapat dikuasai oleh bank akan menipis .<sup>9</sup>

Indikator efektivitas pada likuiditas dalam rangka penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah *Financing to Deposito Ratio ( FDR)*. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga, rasio penyaluran dan penghimpunan dana.<sup>10</sup> FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan.<sup>11</sup> Dalam kegiatan operasionalnya, bank wajib menyediakan likuiditas yang cukup dan mampu mengelolanya dengan baik karena apabila likuiditas yang diperoleh terlalu

---

<sup>9</sup> Sinungan, Muchdarsyah, *Dana Bank Manajemen* Edisi Kedua. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.131.

<sup>10</sup> A. Wangsawidjaja, *"Pembiayaan Bank Syariah"*. (Jakarta: Gramedia, 2012) , h. 117.

<sup>11</sup> Selamat Riyadi, *"Banking Assets and Liability Management"* (Jakarta: Fakultas ekonomi Indonesia, 2006) h. 165.

kecil akan mengganggu kegiatan operasional bank tersebut. Akan tetapi, likuiditas pun tidak boleh terlalu besar karena dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi bank sehingga dapat berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas yang diterima. Jika rasio FDR tinggi maka menunjukkan bahwa tingginya pembiayaan sehingga menyebabkan tingginya resiko.

Resiko pembiayaan dapat diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank. Hal ini menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian pada bank. NPF adalah perbandingan antara Jumlah Kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 sampai 5 dibandingkan Total kredit yang diberikan oleh bank.<sup>12</sup> Bank Syariah memiliki risiko yang relatif sama dengan risiko yang dihadapi bank konvensional, namun bank syariah memiliki risiko yang diatur berdasarkan prinsip syariah.<sup>13</sup> Risiko pembiayaan pada bank syariah terjadi akibat tidak kembalinya pokok pembiayaan yang diberikan dan bank tidak menerima imbalan, ujah atau bagi hasil seperti kesepakatan awal saat terjadi akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima pembiayaan. Selain itu, bank memiliki risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan dan bertambahnya waktu dalam penyelesaian *non performing financing* (NPF), serta mengakibatkan turunnya tingkat kesehatan pembiayaan bank. Sama halnya dengan ajaran islam dalam QS Al-Mulk Ayat 15 yang berbunyi :

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 155.

<sup>13</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 134.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S. Al-Mulk [67]: 15)

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh bank syariah dan likuiditasnya berhubungan dengan besarnya resiko pembiayaan perbankan syariah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh dari pembiayaan UMKM dan likuiditas terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah pada period 2014-2017

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal berikut ini:

1. Data yang di ambil dari penelitian ini adalah pembiayaan UMKM dan likuiditas yang terfokus kepada resiko pembiayaan.
2. Penelitian ini terfokus kepada pengaruh pembiayaan UMKM dan likuiditas yang terfokus kepada resiko pembiayaan priode 2014-2017.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia 2014-2017 ?



2. Apakah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia 2014-2017 ?
3. Bagaimana pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia 2014-2017 dalam perspektif ekonomi Islam ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia 2014-2017.
2. Untuk mengetahui Apakah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia 2014-2017.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia 2014-2017 dalam perspektif ekonomi islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan tentang pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas
- b. Menambah pengetahuan tentang resiko pembiayaan

- c. Menambah pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas yang sudah di pelajari di perkuliahan dan melihat mengaplikasikannya secara real.
- b. Bagi akademik sebagai sumbangan pemikiran di bidang perbankan mengenai di bidang perbankan mengenai pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan likuiditas



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Tinjauan Umum Pembiayaan

###### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Berikut ini dapat pula dikemukakan beberapa pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang umum dikenal luas oleh masyarakat yaitu: Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Veithzal Rivai and Andria Permatal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2008).

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.400



Beberapa pengertian pembiayaan yang dikemukakan menurut para ahli:

1) M. Syafi'i Antonio

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>16</sup>

2) Kasmir

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>17</sup>

3) Chorida

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>18</sup>

Pengertian pembiayaan yang dikemukakan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pemberian dana dari bank kepada pihak lain melalui kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu dan

<sup>16</sup> Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syariah Pare", *An-Nisbah*, Vol. 3 No.2 (2017), h.400.

<sup>17</sup> Mochamad Indrajit Roy, "Aanlisis Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih BPRS Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No.1 (2017), h. 52.

<sup>18</sup> Aidida Adelia Purnama, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Indonesia Periode 2006", *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 20 No.3 (2012), h.7.

ketentuan lain yang sudah disepakati. Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijarah mutahiyah bit tamlik.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, salam, dan *istishna'*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh.
- e) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

#### **b. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

##### **1. Pembiayaan Produktif**

Yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

##### **2. Pembiayaan Konsumtif**

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 160-161

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi;
- 2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>20</sup>

c. **Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan bila dijabarkan mengandung beberapa unsur yaitu sebagai berikut.

1) Kepercayaan,

Uang, barang, maupun jasa yang diberikan kepada debitur harus diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang sudah disepakati.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.165



## 2) Kesepakatan

Kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak bank yang berisi tentang hak dan kewajiban yang termaktub dalam akad pembiayaan.

## 3) Jangka Waktu

Kesepakatan yang tertuang dalam akad pembiayaan mencakup tentang jangka waktu pengembalian. Semua jenis pembiayaan memiliki jangka waktu yang sudah disepakati.

## 4) Risiko

Terjadinya *side streaming*, lalai, dan kesalahan yang disengaja maupun penyembunyian keuntungan nasabah mampu memicu risiko kerugian yang dialami oleh bank yang membuat setiap pembiayaan yang didanai oleh bank tidak sepenuhnya menguntungkan. Adanya tenggang waktu pembiayaan maka besar risiko tidak tertagih demikian pula sebaliknya hal inilah yang menyebabkan munculnya risiko.

## 5) Balas Jasa

Bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan merupakan bentuk balas jasa yang diberikan oleh debitur kepada bank sebagai keuntungan bank.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhamad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah : Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari", *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.2 No.2 (2017), h. 23–24.

#### **d. Tujuan Pembiayaan**

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

##### *1) Profitability*

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

##### *2) Safety*

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin

pengembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.<sup>22</sup>

Selain itu, ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Bank (Selaku Mudharib atau Shahibul Maal)

- a) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
- b) Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar bank.
- c) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
- d) Sebagai salah satu instrumen/produk bank dalam memberikan pelayanan pada customer.
- e) Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- f) Sebagai salah satu komponen dari aset allocation approach.

2) Nasabah (Selaku Shahibul Maal atau Mudharib)

- a) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
- b) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai and Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*, h.50

- c) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- d) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

### 3) Negara (Selaku Regulator)

- a) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
- b) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
- c) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- d) Meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
- e) Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.<sup>23</sup>

### e. Fungsi Pembiayaan

Fungsi dari pembiayaan yang diberikan bank Syariah kepada masyarakat penerima yaitu sebagai berikut:

#### 1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Uang yang disimpan oleh para penabung dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Daya guna uang tersebut ditingkatkan oleh bank kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pada presentase tertentu.

Untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas bahkan memulai usaha baru, para pengusaha memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh pihak

---

<sup>23</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah" *Juna Perbankan*, Vol. I No. 1, November 2003.



bank untuk memperluas usahanya tersebut. Pada dasarnya peningkatan usaha secara menyeluruh dapat melalui pembiayaan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank untuk usaha-usaha yang memiliki manfaat, baik itu manfaat bagi pengusaha maupun bagi masyarakat. Dengan begitu, dana yang ada di bank yang diperoleh dari para penyimpan uang tidaklah *idle* (diam).

## 2) Meningkatkan Daya Guna Barang

- a) Peningkatan *utility* dari bahan mentah menjadi bahan jadi produsen dibantu pembiayaan dari bank.
- b) Pemindahan barang yang dilakukan oleh produsen juga atas bantuan pembiayaan yang dilakukan oleh bank untuk dipindahkan ke tempat yang lebih bermanfaat.

## 3) Meningkatkan Peredaran Uang

Menciptakan pertambahan peredaran uang giral, dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dapat melalui pembiayaan yang disalurkan oleh pengusaha via rekening-rekening koran. Peredaran uang kartal melalui pembiayaan akan lebih berkembang dikarenakan pembiayaan menciptakan keinginan untuk berusaha sehingga dapat meningkatkan baik kualitatif maupun kuantitatif dari penggunaan uang.

## 4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Permintaan akan terus meningkat apabila masyarakat mulai melakukan penawaran terhadap segala macam bentuk usaha. Hal

ini sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Kemudian timbulah efek kumulatif karena besarnya permintaan sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegairahan untuk melakukan produktivitas secara meluas di kalangan masyarakat.

5) Stabilitas ekonomi.

Langkah-langkah stabilitas untuk menetralkan ekonomi yang kurang sehat pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitas prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Pembiayaan bank memegang peran penting untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi.

- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. meningkatnya pendapatan rata-rata yang dialami oleh pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh, maka akan meningkat pula pajak yang dibayarkan yang akhirnya akan berdampak kepada pendapatan negara. Penghasilan devisa untuk konsumsi akan berkurang dan devisa penghasilan akan bertambah. Secara tidak langsung pendapatan nasional akan bertambah melalui pembiayaan.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Negara-negara maju yang ekonominya sudah tergolong kaya akan membantu negara yang perekonomiannya masih berkembang melalui bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan yaitu dengan bunga yang kecil dan jangka waktu yang Panjang untuk menjaga persahabatan antar negara pada sector perekonomian dan perdagangan.<sup>24</sup>

**f. Prosedur Pengajuan Pembiayaan**

- 1) Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri seperti:
  - a) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomor KTP dan NPWP.
  - b) Alamat dan nomor telepon tempat bekerja.
  - c) Keterangan mengenai pekerjaan.
  - d) Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana.
  - e) Specimen tanda tangan.
- 2) Mengumpulkan data diri berupa foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah), dan foto copy kartu keluarga.
- 3) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan.
- 4) Foto copy rekening tabungan selama 6 bulan terakhir.

---

<sup>24</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 305–308.

- 5) Foto copy BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto copy sertifikat SHM/SHGB, ataupun akte tanah.

Proses pemberian pembiayaan yang baik untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan yang harus dilalui, seperti:

- 1) Mewawancarai nasabah/anggota.
- 2) Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah.
- 3) Melakukan negoisasi.
- 4) Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah/anggota.
- 5) Melakukan dokumentasi secara layak.
- 6) Melakukan monitoring pembiayaan yang baik

#### **g. Pembiayaan Konsumtif**

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.<sup>25</sup>

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas

---

<sup>25</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.244.



kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi ataupun lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah dan kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, pariwisata hiburan dan sebagainya.<sup>26</sup>

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya di luar usaha dan umumnya bersifat perseorangan. Pembiayaan konsumsi lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Pembiayaan konsumtif sedikit banyak bersifat tidak produktif, walaupun ada pengaruhnya pada produktifitas masyarakat secara tidak langsung, yaitu mendorong produksi dan supply.<sup>27</sup>

Fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang,

---

<sup>26</sup> Antonio, h. 168.

<sup>27</sup> Rizky Maulana Pribadi, "Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil Pada Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Liquidity*, (2017), h.33.

menimbulkan semangat berusaha, stabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.<sup>28</sup>

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti: pembelian sepeda motor, pembelian komputer, laptop, pembelian mesin cuci, kulkas, televisi, dan segala macam barang konsumsi yang tidak dilarang syari'ah.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan di bank syariah, pemberian konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu:<sup>29</sup>

- a) Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*
- b) Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)
- c) Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
- d) Pembiayaan Konsumen Akad Istisha
- e) Pembiayaan Konsumen Akad Qard dan Ijarah.

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam menetapkan

Pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

---

<sup>28</sup> Viethzal Rivai, Arfiyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 683–685.

<sup>29</sup> Azwar Karim Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 244.

- a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
- b) Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *Murabahah*. Namun, jika berbentuk goods in process, yang harus dilihat berikutnya adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istishna*.
- c) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.

## 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### a. Pengertian Usaha Mikro

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.02 Tahun 2019 tentang UMKM.<sup>30</sup> Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki,

---

<sup>30</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.16.

dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>31</sup>

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00, dan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 19

- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.<sup>32</sup>

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. Disamping usaha mikro kecil dan menengah juga dapat menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap product Domestic Bruto (PDB).

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.



berdampak pada kegiatankegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

#### **b. Karakteristik Usaha Mikro**

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas
- 4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.<sup>33</sup>

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal

---

<sup>33</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana , 2010) ,h. 32.

terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.<sup>34</sup>

**c. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro**

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :

- 1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia;
- 2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru; Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar;
- 3) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya: \
- 4) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.33

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor :

- 1) Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya :
  - a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
  - b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
  - c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
  - d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- 2) Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh

UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendirisendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.<sup>35</sup>

#### **d. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Ada tiga alasan utama suatu negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah karena pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kemudian alasan kedua, seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman.

Untuk alasan ketiga, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. Usaha

---

<sup>35</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010), h .67.



mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah peran penting Usaha Mikro menurut Departemen Koperasi:<sup>36</sup>

- 1) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
- 2) Penyedia lapangan pekerjaan terbesar.
- 3) Pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi, serta.
- 5) Kontribusinya terhadap neraca pembayaran

Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Kecil dan Menengah memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Demikian halnya dengan Indonesia, sejak diterpa badai krisis finansial pada tahun 1996 silam, masih banyak usaha kecil menengah yang hingga saat ini masih mampu bertahan. Meskipun mereka sempat goyang oleh dampak yang ditimbulkan, namun dengan semangat dan jiwa yang kuat maka mereka secara perlahan-lahan mampu bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun negara.

---

<sup>36</sup> Departemen Koperasi 2008 tersedia di : [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id). Situs Resmi Departemen Koperasi.

### 3. Likuiditas

Manajemen likuiditas bank diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna menenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas bagi perusahaan adalah hal yang sangat penting, tidak terkecuali bagi perusahaan perbankan yang bergerak di bidang jasa. Likuiditas ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Ketidakmampuan bank menjaga likuiditas di atas batas minimum akan menyulitkan bank itu sendiri, karena dana-dana tunai yang seharusnya dapat dikuasai oleh bank akan menipis.<sup>37</sup>

### 4. Risiko Pembiayaan

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya sudah dipahami secara institutif. Pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih sangat beragam. Menurut Herman Darmawi, risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.<sup>38</sup> Risiko dilihat dari segi akibat:

- a. Risiko spekulatif ialah kemungkinan kerugian akan tetapi bila disamping itu kemungkinan kerugian terdapat kemungkinan untung.
- b. Risiko murni adalah risiko yang hanya ada kemungkinan kerugian.

---

<sup>37</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT.Dwi Chandra Wacana 2010), h .68.

<sup>38</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 25.

Menurut Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian keuntungan. Pembiayaan atau *financing* dapat pula diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>39</sup>

Menurut Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual-beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, kualitas pembiayaan dilihat dari

---

<sup>39</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 17.

kemampuan membayar debitur ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

a. Lancar/ Kolektibilitas 1

- 1) Pembiayaan angsuran pokok dan bagi hasil/margin/*ujrah* tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
- 2) Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* realisasi pendapatan sama atau lebih dari 80% dari proyeksi pendapatan.
- 3) Nasabah selalu menyampaikan informasi secara teratur dan akurat.
- 4) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap
- 5) Patuh terhadap perjanjian pembiayaan.
- 6) Kewajaran sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas.

b. Dalam Perhatian Khusus/ Kolektibilitas 2

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 hari.
- 2) Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* realisasi pendapatan sama atau lebih 80% dari proyeksi pendapatan.
- 3) Nasabah selalu menyampaikan informasi secara teratur dan akurat

- 4) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan bangunan kuat.
- 5) Cukup patuh terhadap perjanjian pembiayaan.
- 6) Kewajaran sumber pembayaran dapat diidentifikasi, namun kurang sesuai dengan struktur/ jenis pembiayaan.

c. Kurang Lancar/ Kolektibilitas 3

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 120 hari.
- 2) Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* realisasi pendapatan sama atau kurang dari 80% dan lebih dari 30% dari proyeksi pendapatan.
- 3) Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan tetapi akurat.
- 4) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- 5) Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- 6) Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 7) Kewajiban sumber pembayaran berasal dari sumber lain dan kurang sesuai secara material.



d. Diragukan/ Kolektibilitas 4

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah melewati 120 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* realisasi pendapatan sama atau kurang dari 80% dari proyeksi pendapatan.
- 3) Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.
- 4) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- 5) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- 6) Kewajiban sumber pembayaran tidak diketahui dan kurang sesuai secara material.

e. Macet/ Kolektibiliti 5

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah melewati 180 hari.
- 2) Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* realisasi pendapatan sama atau kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan selama lebih dari 3 periode pembayaran berturut-turut.
- 3) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.

- 4) Dokumentasi perjanjian piutang dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

Jadi risiko pembiayaan adalah risiko dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati.<sup>40</sup> Definisi tersebut dapat diperluas bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas pembiayaan semakin menurun.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investas karena teralu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan kualitas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.<sup>41</sup> Risiko pembiayaan muncul ketika bank memiliki sejumlah pembiayaan bermasalah yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Penilaian kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah dikeluarkan sampai dengan lunas digunakan sebuah rasio yang disebut dengan *Non*

---

<sup>40</sup> Edward W, *Bank Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h.185.

<sup>41</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pusat Alfabet, 2006), h.6.

*Performing Financing* (NPF). NPF diukur dari perbandingan antara persentase jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang dikeluarkan bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan suatu bank dan tentunya bank semakin berisiko dalam kondisi yang bermasalah.<sup>33</sup>

Risiko Pembiayaan (*Non Profit Finance*) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

## **B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Usaha Mikro Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wiraswasta dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah fil Ard di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hi. Sastro wahdino, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Dwi Chandra Wacana, 2001), h .52

قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَأَخَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُنِّي عَلَى السُّوقِ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ

Artinya : “Abdurraman bin Auf ketika datang di Madinah, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar Rabi' Al Anshari. Lalu Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman wanita untuk dinikahi dan juga harta. Namun Abdurrahman berkata: ‘semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu, tapi cukup tunjukkan kepadaku dimana letak pasar’. Lalu di sana ia mendapatkan untung berupa aqith dan minyak samin” (HR Al Bukhari 3937)

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status dan jabatan seseorang.

## 2. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam:

- a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturanaturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur“an dan As-Sunnah.
- b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (iqtishadun aqdiyyun), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (al-aqidah sIslamiyah) yang di dalamnya akan dimiintakan pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakininya.
- c. Berkarakter ta“abbudi (thabi“abbudiyun). Mengingat usaha mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan (nizham rabbani).
- d. Terkait erat dengan akhlak (murtabthun bil-akhlaq), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lingkungan Islam yang tanpa akhlak.
- e. Elastic (al-murunah), al-murunah didasarkan pada pada kenyataan bahwa baik al-Qur“an maupun al-Hadits, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
- f. Objektif (al-maudhu“iyyah), Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakekatnya merupakan pelaksanaan



amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.

- g. Realistis (al-waqi'iyah). Prakiraan (forecasting) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
- h. Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah s.w.t dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (al-amwal) tidaklah bersifat mutlak.
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid istikhdam al-mal).<sup>43</sup>

### 3. Dasar Hukum Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pemahaman suatu produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan untuk mendapatkan suatu keuntungan ataupun manfaat dari hasil produksi yang dijalankan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia. Ada yang mengatakan bahwa produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia, atau usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hi. Sastro wahdino, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Dwi Chandra Wacana, 2001), h .52

<sup>44</sup> *Ibid*, h .55

### C. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah melihat beberapa hasil penelitian yang berupa jurnal dan skripsi yang mendukung terhadap penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara mahasiswa UIN Alauddin Makasar (2013) yang berjudul *“Kontribusi Pembiayaan Perbankan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, dan Menengah”*. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penelitian ini, penelitian ini dilakukan di Makasar besarnya pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di kota Makasar berfluktuasi namun secara umum tetap memiliki prospek yang signifikan. Kontribusi pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di kota Makasar sangat dibutuhkan karena masih banyak UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan.<sup>45</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Tri Anugrah Bhakti mahasiswa Universitas Putra Batam (2013) yang berjudul *“Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah”*. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penelitian ini pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah di kota Malang masih terbentur pada resiko yang dihadapi, maka terhadap kendala yang ada maka para pengusaha UMKM yang tidak *bankable* dapat menjadi anggota pada

---

<sup>45</sup> Muslimin Kara, “ Kontribusi Pembiayaan Perbankan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, dan Menengah (UIN Alauddin Makasar) 2013, h.315

suatu koperasi primer dengan salah satu pilihan pembiayaannya dengan prinsip bagi hasil.<sup>46</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Delima Sari Lubis mahasiswa IAIN Padangsidimpuan (2016) yang berjudul “ *Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan*”. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil yaitu Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, oleh karena itu lembaga keuangan dan perbankan syariah, selayaknya dapat memberikan banyak manfaat dalam mendukung pengembangan sektor-sektor riil, khususnya dukungan terhadap UMKM yang fleksibel, lebih kompetitif, transparan, profesional, bersifat universal. Di pihak lain dengan adanya pengembangan dan perbaikan IPTEK, sumber daya manusia dan pola manajemen yang profesional dan sesuai dengan sistem syariah akan menjadi suatu sistem yang tepat dalam menggerakkan dan memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia, khususnya kota Padangsidimpuan. Karena itu penempatan UMKM sebagai dasar pengembangan struktural serta sistem syariah sebagai sistem mitra yang relevan.<sup>47</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rio Kartika, Anwar Rahim, dan Indupurnahayu mahasiswa/i UIKA Bogor (2010) yang berjudul “*Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Likuiditas Terhadap*

---

<sup>46</sup> Rizki Tri Anugrah Bhakti, “Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah” (Universitas Putra Batam) 2013, h.135

<sup>47</sup> Delima Sari Lubis, “Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan” (IAIN Padangsidimpuan) 2016, h.144

*Profitabilitas*". Berdasarkan analisis yang dilakukan penelitian ini, yang mendapatkan hasil yaitu rata-rata industri likuiditas (current ratio) pada perusahaan customer goods subsektor makanan dan minuman yang terdaftar BEI tahun pengamatan 2006-2011 mengalami fluktuasi, likuiditas (current ratio) tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 1150,84%. Berdasarkan analisis secara parsial variabel likuiditas (current ratio) mempunyai signifikan dan perhubungan negatif sebesar 0,214522. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, ketika perusahaan menjaga likuiditas pada tingkat tertentu, seringkali membuat perusahaan tersebut tidak dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan potential profit. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dapat teruji kebenarannya.<sup>48</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muniya Alteza, Lina Nur Hidayati, dan Arum Darmawati mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (2014) yang berjudul "*Perubahan Likuiditas Akibat Pemecahan Saham: Studi di Pasar Modal Indonesia*". Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan hasil yaitu hasil analisis regresi pengujian pengaruh pemecahan saham terhadap likuiditas jangka panjang menunjukkan angka F hitung sebesar 27,533 dan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka pemecahan saham, ukuran perusahaan dan return secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas saham jangka panjang. Sementara nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,093 bermakna bahwa variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 9,30%

---

<sup>48</sup> Rio Kartika, Anwar Rahim, dan Indupurnahayu, "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas"(UIKA Bogor) 2010, h.11

dan sisanya sebesar 90,70% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di gunakan dalam penelitian ini.<sup>49</sup>

Perbedaan penelitian sekarang dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen atau variabel bebas dimana penelitian yang sekarang terfokus pada variabel likuiditas dan resiko pembiayaan yang mana pada penelitian sebelumnya hanya dibahas salah satu variabel nya saja, serta objek penelitian, populasi, sampel dan tahun penelitian atau jangka periode juga berbeda dengan tahun sebelumnya. Periode yang digunakan yaitu dari tahun 2014-2017.

#### **H. Kerangka Pemikiran**

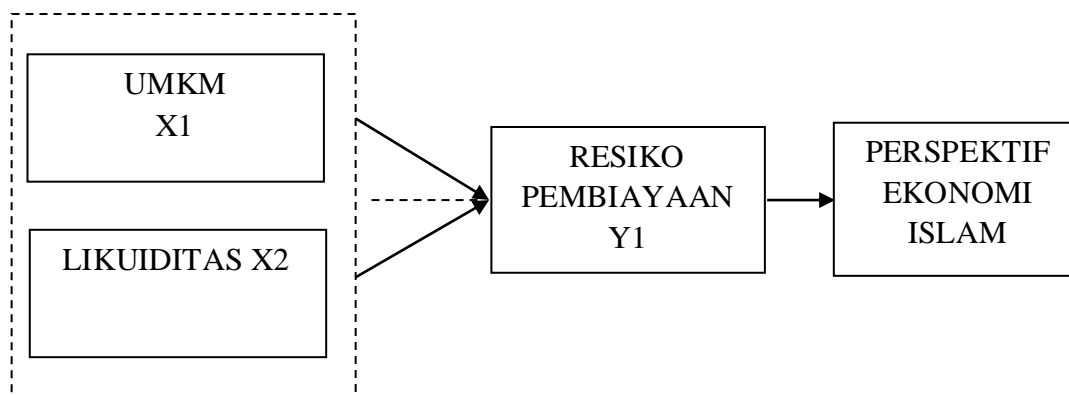
Pada penelitian ini, digunakan kerangka pemikiran untuk mempermudah objek yang diteliti. Mulai dari data-data pencarian laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) dan juga website resmi masing masing bank syariah.

Dari uraian diatas maka kerangka pemikiran dituangkan dalam gambar sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Muniya Alteza, Lina Nur Hidayati, dan Arum Darmawati, "Perubahan Likuiditas Akibat Pemecahan Saham: Studi di Pasar Modal Indonesia" (Universitas Negeri Yogyakarta) 2014, h.15

### KERANGKA BERFIKIR



Keterangan :

—————→ : Hubungan secara parsial

- - - - - : Hubungan secara simultan

#### I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah di nyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang di berikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan dari fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat di nyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing penelitian mempunyai hasil yang berbeda-beda. Sehingga peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV 2015), h. 64



## 1. UMKM terhadap Resiko Pembiayaan

Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria sebagaimana diatur dalam UU No. 02 Tahun 2019 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.<sup>51</sup>

Berdasarkan penelitian Sari (2016) pembiayaan UMKM berpengaruh positif bersifat kuat terhadap NPF<sup>52</sup>. Muslimin Kara (2013) mengatakan bahwa besarnya pembiayaan syariah yang di salurkan oleh perbankan syariah oleh sektor-sektor ekonomi dan UMKM di kota Makasar berfluktuasi<sup>53</sup>. Rizki mengatakan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan Syariah tidak berpengaruh signifikan<sup>54</sup>

Berdasarkan kerangka teoritis dan penjabaran teori yang telah di jabarkan di atas hipotesis penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiko pembiayaan.

---

<sup>51</sup> Achmadian Davin Wibisono, "Pengaruh Pembiayaan (UMKM) dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan" *Jurnal kuitansi Universitas Surabaya* h.114

<sup>52</sup> Delima Sari Lubis "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Syariah Sebagai Upaya Pengntasan Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan" h.11

<sup>53</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Syariah terhadap Pengembangan UMKM" *Jurnal UIN Alauddin Makasar*. h.8

<sup>54</sup> Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah". h.11

## 2. Likuiditas terhadap Resiko Pembiayaan

Manajemen likuiditas bank diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas bagi perusahaan adalah hal yang sangat penting, tidak terkecuali bagi perusahaan perbankan yang bergerak di bidang jasa. Likuiditas ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Ketidakmampuan bank menjaga likuiditas di atas batas minimum akan menyulitkan bank itu sendiri, karena dana-dana tunai yang seharusnya dapat dikuasai oleh bank akan menipis.<sup>55</sup>

Bukti empiris dari Kara (2013) mengatakan FDR berpengaruh signifikan positif terhadap NPF<sup>56</sup>. Lea Trisnawati (2017) mengatakan NPF berpengaruh secara signifikan dalam pembiayaan dimana NPF merupakan kemungkinan Bank Syariah mengalami kerugian dimana tidak ada hubungan secara langsung dengan pembiayaan UMKM<sup>57</sup>. Muniya Alteza mengatakan Analisis regresi pengujian pengaruh pemecahan saham terhadap likuiditas jangka panjang menunjukkan angka F hitung sebesar 27,533 dan signifikan 0,000. Dengan demikian maka pemecahan saham, ukuran perusahaan dan return secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas saham jangka panjang.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Sinungan, Muchdarsyah, *Dana Bank Manajemen* Edisi Kedua. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.131.

<sup>56</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Syariah terhadap Pengembangan UMKM" (Jurnal UIN Alauddin Makasar) h.7

<sup>57</sup> Lea Trisnawati "Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah" h. 7

<sup>58</sup> Muniya Alteza, Lina Nur Hidayati, dan Arum Darmawati. "Perubahan Likuiditas Akibat Pemecahan Saham Studi Di Pasar Modal Indonesia".h.54

Berdasarkan kerangka teoritis dan penjabaran teori yang telah dijabarkan di atas hipotesis penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Variabel Likuiditas (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiko pembiayaan.

### 3. UMKM dan Likuiditas terhadap Resiko Pembiayaan.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.02 Tahun 2019 tentang UMKM.<sup>59</sup> Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>60</sup> Ketidakmampuan bank menjaga likuiditas di atas batas minimum akan menyulitkan bank itu sendiri, karena dana-dana tunai yang seharusnya dapat dikuasai oleh bank akan menipis.<sup>61</sup>

Pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih sangat beragam. Menurut Herman Darmawi, risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.<sup>62</sup> Rio (2010) dalam penelitiannya mengatakan LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Trisa Dini mengatakan Bank Syariah senantiasa di hadapkan pada resiko-resiko yang berkaitan erat dengan fungsinya yaitu resiko

---

<sup>59</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.16.

<sup>60</sup> *Ibid*, h.17

<sup>61</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT.Dwi Chandra Wacana 2010), h .68.

<sup>62</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 25.

pembiayaan maka sejogjanya Bank Syariah di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berhati hati dalam mengelola usaha tersebut.<sup>63</sup>

H<sub>3</sub> : UMKM dan Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiko pembiayaan



---

<sup>63</sup> Trisa Dini Prasastina,” Pengelolaan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah”. h.409